

PENYEBARAN INFORMASI VAKSINASI MELALUI TWITTER OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAN KOTA BALIKPAPAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Rizky Pratama¹, Riska Tifa Senobaan², Sapril Nurul Ramdanis³, Geby Cornelia⁴,
Bambang Irawan⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi : kikiriskipratama78@gmail.com

Abstract: *The COVID-19 pandemic poses a challenge for the Government to maximize information technology. The COVID-19 pandemic has entered a recovery period with the implementation of vaccinations. Vaccination is essential as the main requirement for people during the New Normal period. Therefore, it is essential to disseminate information on the implementation of vaccinations by utilizing advances in information technology through Twitter. Through Twitter, the Government can disseminate information covering four aspects of information that the Government must provide and announce to the UU Nomor 14 Tahun 2008. This study aims to see how the spread of COVID-19 vaccination information through social media, Twitter, Samarinda City Government, and Government Balikpapan City. This study uses a qualitative approach with data analysis using NVivo 12 Plus software. The data was obtained through the Twitter accounts @ppid_smr and @PemkotBPN. The study results concluded that during the COVID-19 pandemic, the Twitter accounts of the Samarinda City Government and the Balikpapan City Government had properly disseminated vaccination information to the public. Although there are differences in the intensity of the tweets from the two accounts, the Twitter accounts of the City of Samarinda and the City of Balikpapan have fulfilled three aspects of disseminating information that must be provided and announced to the UU Nomor 14 Tahun 2008.*

Keyword: *Information Technology, Vaccination, Twitter, Public Information Disclosure.*

Abstrak: *Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi Pemerintah agar dapat memaksimalkan teknologi informasi. Saat ini, pandemi COVID-19 telah memasuki masa pemulihan dengan dilaksanakannya vaksinasi. Vaksinasi penting dilaksanakan sebagai syarat utama bagi masyarakat pada masa New Normal. Oleh sebab itu, informasi penyelenggaraan vaksinasi penting untuk*

disebarluaskan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi salah satunya melalui Twitter. Melalui Twitter, Pemerintah dapat menyebarluaskan informasi dengan mencakup empat aspek informasi yang wajib disediakan dan diumumkan Pemerintah kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyebaran informasi vaksinasi COVID-19 melalui media sosial Twitter Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan software NVivo 12 Plus. Data diperoleh melalui akun Twitter @ppid_smr dan @PemkotBPN. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, akun Twitter Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan penyebaran informasi vaksinasi dengan baik kepada masyarakat. Walaupun terdapat perbedaan intensitas. kicauan dari kedua akun tersebut, namun akun Twitter Pemerintah Kota Samarinda dan Kota Balikpapan telah memenuhi empat aspek penyebarluasan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Kata kunci: Teknologi Informasi, Vaksinasi, Twitter, Keterbukaan Informasi Publik.

Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, teknologikomunikasi dan informasi mengalami perkembangan yang pesat. Teknologi informasi dan komunikasi kemudian menjadi salah satu pilar pembangunan di era globalisasi saat ini (Andiyansari, 2014). Kemajuanteknologi telah menyediakan sumber data dan fakta yang diolah menjadi berbagi informasi dan komunikasi yang sangat luas dengan apa yang manusia miliki (Ahmad,2012). Salah satu bentuk kemajuan teknologi ini ialah berkembang pesatnya penggunaan internet yang semakin merebak di dunia (Setiawan, 2017). Lajunya perkembangan teknologi internet dan penyebaran informasi secara cepat yang dibutuhkan dalam segala bidang menjadi faktor yang mengarahkan pembaharuan informasi yang ada (Disperkimta Buleleng, 2018).

Saat ini media online telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Di masapandemi media online menjadi semakin aktif digunakan masyarakat (Hasbi & Sumarni, 2020). Meningkatnya kebutuhan akan informasi yang terjadi di masyarakat menjadikan media online sebagai sumber informasi utama (Nur, 2021). Adapun media online menyajikan informasi dengan mudah dan dapat menerima informasi dari seluruh dunia (Aisyah & Chandra Oktaviani, 2018). Media online juga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sehingga, eksistensi media online di era modern ini telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor dalam membuka ruang komunikasi kepada publik (Priyatna et al., 2020). Dari kemudahan dan kecepatan akses yang disajikan, masyarakat semakin intens dalam mengakses serta menggunakan media online. Media online menjadi sarana bagi publik dalam menerima informasi dengan mudah

dan cepat (Nur, 2021). Kuatnya arus informasi yang terjadi melalui media online membuat media online semakin intens digunakan. Dengan media online, maka ruang komunikasi semakin tidak ada jarak, mudah, dan cepat untuk diakses (Surokim et al., 2017).

Informasi mengenai fenomena terkini yang terjadi disekitar menjadi agenda krusial bagi keberlangsungan hidup manusia, terutama di masa pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh negara (Vinka & Michele, 2021), yang pada akhirnya mengubah tatanan kehidupan (Gandryani & Hadi, 2021). Indonesia dihadapi oleh situasi pandemi COVID-19 yang terus mengalami perubahan, menuntut masyarakat untuk selalu mengakses informasi terbaru seputar COVID-19. Saat ini, kehadiran internet telah menjadi rujukan utama dalam menerima informasi terkini seputar COVID-19 (Kominfo, 2020). Masyarakat dapat secara berkala mengakses pusat informasi COVID-19 melalui laman website resmi pemerintah covid19.go.id yang menyediakan berbagai informasi mengenai peta sebaran COVID-19 di Indonesia, ketersediaan vaksinasi, regulasi, dan himbauan-himbauan pencegahan, serta penanganan terkait kasus COVID-19 di Indonesia.

Saat ini media sosial menjadi salah satu media online yang paling banyak digunakan. Media sosial digunakan sebagai sarana bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah memberi dan menerima informasi serta ide secara virtual (Fitriani, 2017). Salah satu informasi yang penting untuk disampaikan pada masa pandemi COVID-19 ini adalah vaksinasi, karena dengan dilakukannya vaksinasi dapat memutus rantai penularan virus COVID-19 (Kinanti, 2022). Selain itu, dengan vaksinasi memungkinkan setiap orang untuk dapat kembali pada rutinitas pasca pandemi (Vinka & Michele, 2021). Media sosial telah terbukti menjadi alat penyebaran informasi yang cukup efektif dalam pengimplementasiannya (Kurniasih, 2013). Media sosial memegang peranan yang amat penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat di semua bidang (Fitriani, 2017). Media sosial mengubah sudut pandang setiap orang dalam cara menerima dan memberikan ide dan berinteraksi, institusi dan lembaga juga dapat menggunakan teknologi dalam membentuk identitas diri dan merepresentasikan citra dari institusi dan lembaga tersebut bukan hanya pada dunia secara global tetapi juga di dunia maya (Solihin et al., 2021). Media sosial mengundang semua pihak yang tertarik dengan berpartisipasi dengan memberikan kontribusi secara terbuka, berkomentar, berbagi informasi tanpa batas waktu (Kaplan & Haenlein, 2010).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk bisa melewati masa krisis pandemi COVID-19. Salah satu tindakan yang diambil adalah dengan menyediakan vaksin COVID-19 (Nawang Sari et al., 2021). Ketersediaan vaksinasi kemudian menjadi amat penting dalam menangani pandemi COVID-19 di masyarakat saat ini. Penyebaran COVID-19 dapat dihentikan dan diminimalisir melalui vaksinasi (Vinka & Michele, 2021). Kini, vaksin menjadi syarat mutlak bagi masyarakat untuk berkegiatan di ruang publik agar dapat kembali pada rutinitas pasca pandemi (Kurnianingrum, 2021). Pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam keterlibatan proses perencanaan kegiatan vaksinasi yang akan dibagikan kepada masyarakat luas (Sylvana & Selian, 2021). Dengan demikian, Indonesia memasuki tahap baru seiring dengan kabar pelaksanaan proses vaksinasi yang gencar dilakukan.

Saat ini pemerintah telah melaksanakan upaya vaksinasi ketiga atau booster kepada masyarakat. Menurut data dari covid.go.id bahwa sebanyak 31 juta rakyat Indonesia telah melaksanakan vaksin ketiga hingga 18 April tahun 2022 (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2022). Namun jumlah tersebut masih jauh dari target vaksinasi di Indonesia yaitu sebanyak 208 juta jiwa. Maka, penyebaran informasi vaksinasi menjadi penting untuk disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya melalui media sosial. Pemerintah dapat menggunakan media sosial dalam memberikan informasi seputar vaksinasi kepada masyarakat, terutama informasi yang mencakup tiga aspek sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP juga menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan publik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik sebagaimana yang tertuang dalam bab IV dan V UU KIP yang menjabarkan apa saja informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat seperti informasi secara berkala, secara serta-merta dan tersedia setiap saat. Oleh karena itu, melalui menggunakan media sosial pemerintah akan lebih mudah memberikan informasi kepada masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung didalam UU KIP.

Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap media sosial resmi pemerintah untuk melihat seberapa jauh desiminasi informasi vaksinasi COVID-19 telah dijalankan. Media sosial twitter menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh instansi pemerintahan. Twitter merupakan salah satu media sosial yang populer digunakan masyarakat di Indonesia. Menurut laporan Statista, terdapat 18,45 juta jiwa pengguna aplikasi ini di Indonesia per Januari 2022 lalu (Annur, 2022). Hal ini mendasari penggunaan media sosial yang dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai ruang penyebaran informasi. Akun twitter yang akan menjadi sumber data penyebaran informasi vaksinasi dalam penelitian ini adalah akun resmi Pemerintah Kota Samarinda yaitu @ppid_smr, dan akun resmi Pemerintah Kota Balikpapan yaitu @PemkotBPN. Berdasarkan pada hal tersebut maka tim peneliti tertarik untuk meneliti terkait “Penyebaran Informasi Vaksinasi Melalui Twitter Oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Kota Balikpapan Pada Masa Pandemi COVID-19”.

Kerangka Teori

Open Government 4.0

Open Government (OG) memiliki makna sebagai pemerintah yang terbuka atau transparan bagi publik, mudah untuk diakses oleh seluruh masyarakat serta melibatkan seluruh kalangan untuk berkolaborasi (Ingrams et al., 2020; Janssen, 2018; Pusdatin Dephub, 2012). Sehingga, open government dapat dipahami sebagai pemerintahan yang transparan dalam dalam membuka data dan informasi kepada publik. Melalui open government, telah membawa birokrasi ke arah reformasi (Ingrams et al., 2020; Piotrowski, 2016).

Saat ini perkembangan keterbukaan informasi dalam pemerintah di era 4.0 mulai mengenal dengan istilah open government dan open data (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2019). Kunci utama dari open government 4.0 ialah data yang digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan (Dept. Of Energy, 2016). Data yang

tersedia memberikan kesempatan kepada publik untuk menjelajahi informasi yang tersedia dan yang mereka butuhkan (NSF, 2016). Dengan data tersebut pemerintah dapat menggunakannya untuk memberikan informasi kepada publik. Informasi dan penyebarannya menjadi dasar pada open government (OPM.GOV, 2016). Adapun informasi yang telah disediakan dapat mudah ditemukan kembali menjadi sebuah catatan digital (OPM.GOV 2016). Di era open government 4.0, pemerintah diharapkan dapat lebih informatif dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan arahan UU KIP No. 14 Tahun 2008. Melalui undang-undang tersebut dapat memberikan ruang bagi pemerintah dalam penyebaran informasi.

Big Data dalam Media Sosial

Media sosial menjadi salah satu dari sumber dari big data yang kompleks dan luas. Perkembangan teknologi internet telah memanifestasikan suatu sistem yakni big data sebagai penyimpanan skala besar untuk memuat segala informasi (O. Solihin, 2021). Big data sendiri merupakan pengembangan dari sistem *database* pada umumnya. Dengan adanya big data ini memudahkan manusia dalam menampung lebih banyak data yang dibutuhkan. Teknologi big data ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis media sosial (O. Solihin, 2021). Teknologi media sosial mempunyai potensi yang besar untuk berkembang seiring berjalannya waktu. Media sosial tidak hanya memungkinkan para penggunanya untuk saling berinteraksi, namun juga menjadi sumber data yang paling representatif dan relevan (Bello-Ortiz et al., 2016) yang mana media sosial mengandalkan sumber data dari beragam digital platform yang tersedia dengan adanya koneksi internet. Beragamnya jenis interaksi sosial melalui penggunaan media sosial ini akan memunculkan sejumlah besar informasi dan data mengenai berbagai hal. Dengan potensi besar informasi dan data saat ini dan masa depan, ada juga potensi besar untuk mengubah informasi yang tersedia menjadi pengetahuan, memungkinkan pengambilan keputusan (kebijaksanaan) yang optimal dalam kondisi yang berubah dengan cepat. (Moertini, V. S., 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menelusuri akun Twitter pemerintah Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, kedua akun tersebut yakni @ppid_smr dan @PemkotBPN. Dengan pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti memvisualisasikan lalu mendeskripsikan data dari kedua akun twitter. Melalui penyebaran informasi vaksinasi sebagai bagian dari konsep *open government* yang dimana pemerintah membuka informasi yang dibutuhkan publik sesuai tiga aspek informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan yang tertera dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Tiga aspek tersebut meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode *content analysis* dengan bantuan software Nvivo 12 Plus. Metode analisis ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi penyebaran informasi vaksinasi melalui akun twitter Pemkot Samarinda dan Pemkot Balikpapan. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data diawali dari pengambilan data twitter menggunakan fitur google

NCapture pada Nvivo 12 Plus, kemudian melakukan eksplorasi, coding, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan.

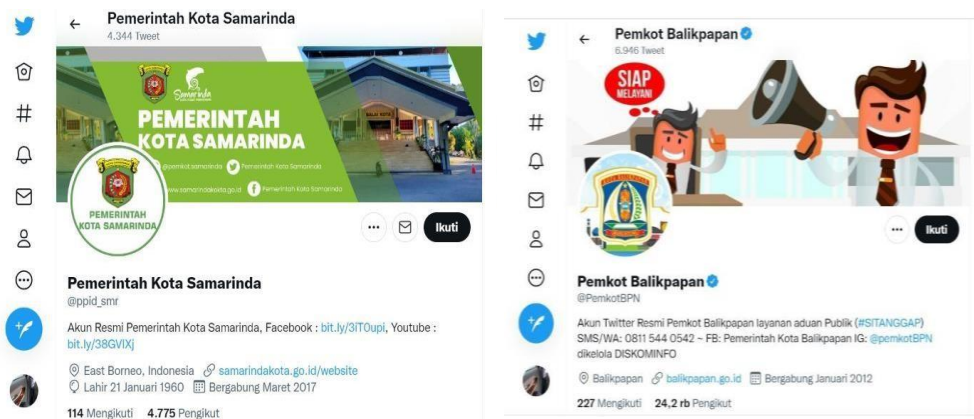
Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, membahas tentang intensitas tweet yang dilakukan oleh kedua akun pemerintah yaitu @ppid_smr dan @PemkotBPN Kota Balikpapan. Selanjutnya, membahas tentang penyebaran informasi vaksinasi oleh kedua akun tersebut dan penyebaran informasi vaksinasi menurut UU KIP di masa pandemi COVID-19.

Intensitas Akun Twitter @ppid_smr dan @Pemkot_BPN

Twitter merupakan platform media sosial microblogging. Microblogging diartikan sebagai bentuk komunikasi di mana pengguna menggambarkan status mereka dalam pesan teks singkat (Java et al., 2007; Tang & Hew, 2017). Sehingga twitter dijadikan sebagai sarana dalam menyebarkan informasi serta membangun komunikasi bagi setiap pengguna (Seok-Jin et al., 2018). Selain itu, twitter juga mempermudah masyarakat dalam mencari informasi secara *real time*.

Adapun dua akun pemerintah yang diteliti adalah pemerintah kota samarinda @ppid_smr dan pemerintah kota balikpapan @PemkotBPN. Kedua akun tersebut merupakan akun resmi pemerintah yang sudah terintegrasi dengan website resmi pemerintah seperti yang terlihat pada gambar 1:



Gambar 1: Akun Twitter Kota Samarinda dan Kota Balikpapan (Sumber: Peneliti,2023)

Kini, media sosial menjadi sarana komunikasi bagi masyarakat hari dan berkontribusi besar pada perubahan yang terjadi sekitar masyarakat (Batara et al., 2017). Dalam menyebarkan informasi melalui pemanfaatan media sosial, dengan twitter dapat memberikangkambaran sejauh mana upaya PemerintahKota Samarinda dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyebarkan informasi. Dalam penyebaran informasi melalui media sosial, penggunaan twitter dapat memberikan gambaran sejauh mana pemerintah samarinda dan balikpapan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Pada gambar 2 akan menunjukkan intensitas tweet pada kedua akun @ppid_smr dan @PemkotBPN.

Gambar 5: Word Cloud @Pemkot_BPN



(Sumber: Dikelola menggunakan Nvivo 12 Plus)



Pada akun Kota Samarinda kata yang sering muncul yaitu https, samarinda, dan kota. Kata “https” ini mendemonstrasikan informasi lanjutan yang diberikan Pemerintah Kota Samarinda kepada masyarakat, dimana informasi yang diberikan dari akun twitter ini menghimbau masyarakat untuk mengakses langsung ke website yang tersedia. Begitu pula dengan akun twitter @PemkotBPN, menunjukkan tiga perhatian utama yang sering muncul ditampilkan, yaitu https, balikpapan dan sahabat. Kata “https” ini menunjukkan informasi lanjutan yang harus masyarakat akses dalam informasi yang sudah tersedia. Kedua “balikpapan” menunjukkan upaya pemerintah dalam mengenalkan kota Balikpapan kepada masyarakat. Ketiga, “sahabat” ini bersamaan dengan “minfo” yang merupakan nama panggilan masyarakat yang disebut pemerintah Kota Balikpapan dalam setiap tweet yang diberikan. Hal ini menyatakan hubungan kedekatan mengenai vaksinasi kedua akun yang ingin dibangun Pemerintah Kota Balikpapan kepada masyarakat dalam pemberian informasi berkualitas. Saat ini, pendayagunaan media sosial dalam proses berkomunikasi semakin populer. Media sosial juga sebagai wujud partisipatif dari para penggunanya, sehingga mampu berkomunikasi memberikan tanggapan yang positif maupun negatif terhadap informasi yang diterimanya (Suminto & Al Farizi, 2020). Bentuk komunikasi yang dibangun oleh pemerintah memiliki tujuan untuk penyajian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan negara (Erliana, 2014). Hal ini sejalan dengan frekuensi kata-kata yang sering muncul pada kedua akun twitter ini. Dengan informasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih mudah mengetahui informasi terkait fenomena yang penting dan isu yang beredar di masyarakat.

Penyebaran InformasiVaksinasi di Twitter

Vaksinasi menjadi sangat penting bagi masyarakat, hal ini dikarenakan vaksinasi menjadi syarat bagi masyarakat agar dapat beraktivitas bebas pada masa *new normal* Pemerintah Kota Samarinda dan pemerintah Kota Balikpapan melalui akun twitter @ppid_smr dan @PemkotBPN telah memberikan informasi terkait vaksinasi kepada pengguna media sosial. Pada Tabel 2 menunjukkan intensitas

kedua akun baik dalammen-tweet maupun meretweet kegiatan yang berhubungan dengan vaksinasi Covid-19. Menggunakan fitur pencarian kata pada software Nvivo 12 Plus tim peneliti dapat melihat jumlah tweet yang sering digunakan dalam memberikan informasi vaksinasi Covid-19 melalui kedua akun twitter.

Gambar 6: Intesitas Informasi Vaksinasi

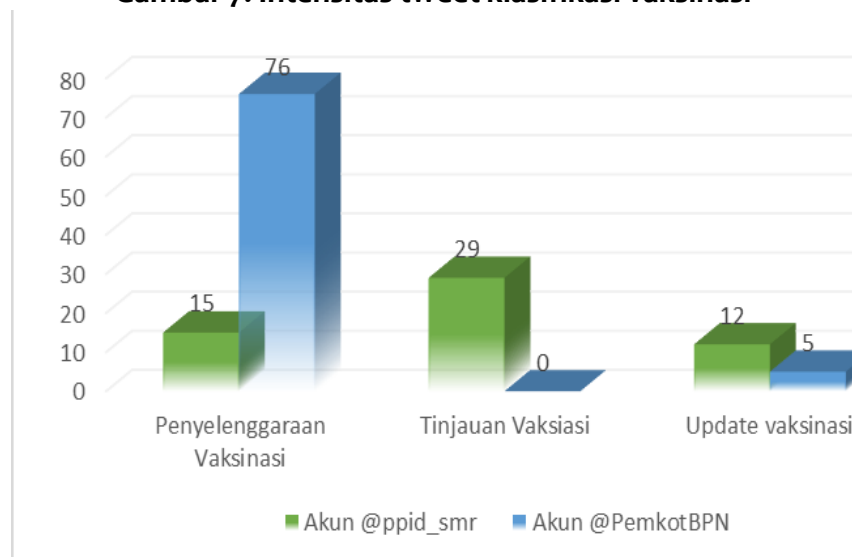
	Name	References
	(1) Pemkot Balikpapan (@PemkotBPN) ~ Twitter	81
	(1) Pemerintah Kota Samarinda (@ppid_smr) ~ Twitter	56

(Sumber: Dikelola menggunakan Nvivo 12 Plus)

Intensitas tweet mengenai vaksinasi berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa akun @PemkotBPN lebih aktif dibandingkan dengan akun @ppid_smr. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Balikpapan lebih banyak memberikan informasi terkait vaksinasi dibandingkan dengan Pemerintah Kota Samarinda. Melihat pada intensitas kedua akun, tim peneliti kemudian mengklasifikasikan seluruh informasi mengenai vaksinasi yang disebarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Balikpapan melalui kedua akun twitter. Adapun hasil dari analisa mengklasifikasikan informasi menjadi tiga yaitu penyelenggaraan vaksinasi, tinjauan vaksinasi, dan update vaksinasi.

Penyelenggaraan vaksinasi dapat dilihat pada informasi yang berkaitan dengan vaksinasi yang akan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun instansi lainnya. Tinjauan vaksinasi dapat dilihat dari informasi yang disebarkan oleh kedua akun mengenai tinjauan, kunjungan, dan memeriksa penyelenggaraan vaksinasi baik oleh pemerintah maupun oknum nonpemerintah. Sementara itu, update vaksinasi dapat dilihat dari informasi terkait status vaksinasi dan informasi terkait vaksinasi lainnya selain daripada penyelenggaraan dan tinjauan vaksinasi. Adapun intensitas tweet berdasarkan klasifikasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7: Intensitas tweet klasifikasi vaksinasi



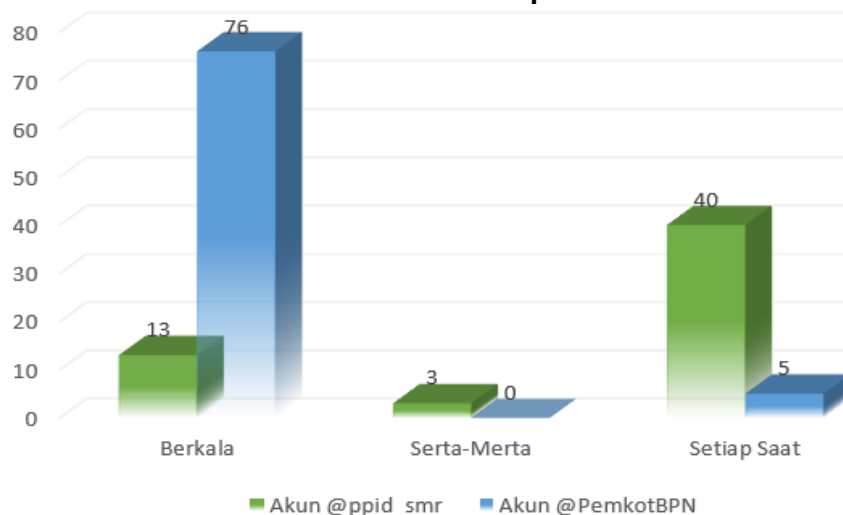
(Sumber: Dikelola menggunakan Nvivo 12 Plus)

Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa dalam memberikan informasi mengenai penyelenggaraan vaksinasi akun @PemkotBPN lebih aktif jika dibandingkan dengan akun @ppid_smr, dengan selisih yang sangat jauh yakni 76 tweet penyelenggaraan vaksinasi dari akun @PemkotBPN dan 15 tweet dari akun @ppid_smr. Informasi tinjauan vaksinasi akun @ppid_smr sebanyak 29 tweet dan akun @PemkotBPN tidak ada informasi terkait tinjauan vaksinasi. Sementara itu, informasi update vaksinasi akun @ppid_smr sebanyak 12 tweet dan akun @PemkotBPN sebanyak 5 tweet mengenai update vaksinasi. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa akun @ppid_smr masih kurang optimal dalam memberikan informasi terkait vaksinasi khususnya melalui twitter. Padahal, program vaksinasi di Indonesia masuk dalam salah satu topik trending twitter Indonesia. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pengguna di media sosial twitter juga memiliki kepedulian dengan isu-isu publik seperti program vaksinasi (Kurniawan, 2019).

Penyebaran Informasi Vaksinasi Berdasarkan UU KIP

Berdasarkan UU KIP, keterbukaan informasi publik memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, diterima sesuai dengan undang-undang ini oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau badan publik lainnya, dan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan tiga aspek dalam penyebaran informasi yang wajib diumumkan dan disediakan pemerintah sesuai dengan konsep open government. Pada tabel berikut menunjukkan jumlah tweet dari kedua akun twitter yang diteliti dengan mengklasifikasi pada tiga aspek informasi yang terbuka pada UU KIP:

Gambar 8: Klasifikasi informasi berdasarkan tiga aspek Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan pada UU KIP



(Sumber: Dikelola menggunakan Nvivo 12 Plus)

Dari diagram tersebut didapatkan bahwa akun @ppid_smr lebih intens memberikan informasi kepada aspek setiap saat, sedangkan akun @PemkotBPN memberikan informasi yang intens pada aspek berkala. Pada aspek lainnya baik akun @ppid_smr maupun akun @PemkotBPN intensitas informasinya masih kurang. Dapat diketahui bahwa akun @ppid_smr dan akun @PemkotBPN dalam menyebarkan

informasi masih belum optimal dalam memenuhi aspek dalam UU KIP. Intensitas tweet yang diberikan dari kedua akun masih kurang informatif bagi masyarakat terkait kebutuhan informasi vaksinasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyebarkan informasi vaksinasi. Disimpulkan bahwa pemerintah harus memenuhi tiga aspek dalam informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan konsep open government. Melalui hal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Balikpapan masih belum optimal melakukan penyebaran informasi vaksinasi kepada masyarakat. Melalui data yang telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa akun media sosial twitter dengan intensitas paling tinggi ialah akun @ppid_smr dengan perbandingan jumlah tweet yang cukup jauh dari akun @PemkotBPN.

Akan tetapi dalam intensitas penyebaran informasi terkait vaksinasi, akun @PemkotBPN lebih intens dalam menyediakan informasi terkait vaksinasi dengan 81 tweet berbeda cukup jauh dari akun @ppid_smr dengan 56 tweet. Sementara itu berdasar pada tiga aspek informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dalam UU KIP, penyebaran informasi mengenai vaksinasi dari kedua akun yakni @ppid_smr dan @Pemkot_BPN masih belum tersampaikan dengan baik. Akun @ppid_smr pemerintah lebih dominan dalam memberikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat dengan 40 tweet dibandingkan dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta-merta yang masing-masing sebanyak 13 dan 3 tweet saja. Sementara itu dari akun @PemkotBPN lebih dominan dalam memberikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dengan sebanyak 76 tweet sangat berbeda jauh dari kedua aspek lainnya yaitu informasi yang wajib diberikan dan diumumkan secara serta-merta dan setiap saat yang masing-masing sebanyak 0 dan 5 tweet saja. Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Samarinda diharapkan lebih intens dalam memenuhi informasi melalui tiga aspek informasi yang terbuka pada UU KIP. Tidak hanya intens dalam penyebaran informasi vaksinasi, namun memenuhi seluruh aspek kelompok informasi yang terbuka bagi masyarakat.

Rekomendasi

Melalui kesimpulan yang telah peneliti tuliskan diatas, bahwa penggunaan media sosial twitter dalam menyebarkan informasi vaksinasi melalui akun @ppid_smr dan @PemkotBPN masih belum optimal.

Oleh karenanya, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyebaran informasi mengenai vaksinasi dari kedua akun (@ppid_smr dan @PemkotBPN) melalui twitter harus ditingkatkan lagi terkhusus pada penyelenggaraan vaksinasi dikarenakan dari jumlah keseluruhan tweet dari kedua akun, tweet mengenai penyelenggaraan vaksinasi terbilang sangat sedikit.

2. Informasi vaksinasi berdasarkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara aserta merta dalam UU KIP harus aktif disampaikan oleh kedua akun twitter. Hal ini agar masyarakat dapat melihat perkembangan mengenai penanganan pandemi Covid19 melalui vaksinasi khususnya melalui media sosial twitter.

Daftar Pustaka

- A. Benetoli, T. F. Chen, & P. Aslani. (2018). How Patients' Use of Social Media Impacts Their Interactions With Healthcare Professionals. *Patient Education and Counseling*, 101(3), 439–444. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.pec.2017.08.015>.
- Ahmad, A. (2012). Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Kesenjangan Informasi: Akar Informasi dan Berbagai Standarnya. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13(1), 137–149.
- Aisyah, Y., & Chandra Oktaviani, R. (2018). Pemanfaatan Media Online Beritajakarta.Id Dalam Publikasi Program Kerja Pemprov Dki Jakarta. *Avant Garde*, 6(2), 42. <https://doi.org/10.36080/avg.v6i2.759>.
- Andiyansari, P. (2014). Studi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 18(2), 117–130. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v18i2.14>.
- Annur, C. M. (2022). *Pengguna Twitter Indonesia Masuk Daftar Terbanyak di Dunia, Urutan Berapa?* Databoks.Katadata.Co.Id. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/pengguna-twitter-indonesia-masuk-daftar-terbanyak-di-dunia-urutan-berapa#:~:text=Jumlah pengguna Twitter terbanyak \(per Januari 2022\)&text=Twitter merupakan salah satu jejaring,Aair per Januari 2022](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/pengguna-twitter-indonesia-masuk-daftar-terbanyak-di-dunia-urutan-berapa#:~:text=Jumlah pengguna Twitter terbanyak (per Januari 2022)&text=Twitter merupakan salah satu jejaring,Aair per Januari 2022).
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2019). Capaian Keterbukaan Informasi Publik Meningkat, Kepala BPPT Tekankan Pentingnya Open Government. Badan Riset Dan Inovasi Nasional. <https://www.bppt.go.id/berita-29/bppt/capaian-keterbukaan-informasi-publik-meningkat-kepala-bppt-tekan-pentingnya-open-government>. Diakses pada tanggal 14 April 2022.
- Batara, E., Nurmandi, A., Warsito, T., & Pribadi, U. (2017). Are government employees adopting local e-government transformation?: The need for having the right attitude, facilitating conditions and performance expectations. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 11(4), 612–638. <https://doi.org/10.1108/TG-09-2017-0056>.
- Bello-Orgaz, G., Jung, J. J., & Camacho, D. (2016). Social Big Data: Recent Achievements and New Challenges. *Information Fusion*, 28, 45–59.
- Disperkimta Buleleng. (2018). *Perkembangan Teknologi Informasi*. Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.
- Erliana, H. (2014). Paradigma Komunikasi Pemerintahan. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 54.
- Fitriani, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat. *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, 19(2), 152. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/view/2120>.

- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *Prosiding SENAPENMAS*, 10 (April), 1263. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.voio.15162>.
- Hasbi, M., & Sumarni, W. (2020). *Pemanfaatan Platform Digital di Masa Pandemi Covid-19*.
- Ingrams, A., Piotrowski, S., & Berliner, D. (2020). Learning from Our Mistakes: Public Management Reform and the Hope of Open Government. *Perspectives on Public Management and Governance*, 3(4), 257–272.
- Janssen, M. (2018). What is Open Government?. TU Delft Open Course Ware. <https://ocw.tudelft.nl/courselectures/what-is-opengovernment/>. Diakses pada tanggal 15 April 2022.
- Java, A., Song, X., Finin, T., & Tseng, B. (2007). *Why we twitter: understanding microblogging usage and communities*. <https://doi.org/10.1145/1348549>.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>.
- Kinanti, F. D. (2022). EVALUATION OF MASS VACCINATION ORGANIZATION FOR EARLY STIKES STUDENTS OF PEKANBARU BROS HELD IN THE GOVERNMENT. 43–50. <https://ojs.stikesawalbrospekanbaru.ac.id/index.php/jsabp/article/view/164/77>.
- Kominfo. (2020). *Kominfo Beri Edukasi Pemanfaatan Internet dalam Cegah Covid-19*. Kementerian Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/26336/kominfo-beriedukasipemanfaatan-internet-dalam-cegah-covid-19/0/berita_satker
- Kurnianingrum, T. P. (2021). Perlukah Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Ruang Publik? *Info Singkat*, XIII(II), 1–6.
- Kurniasih, N. (2013). *Penggunaan Media Sosial bagi Humas di Lembaga Pemerintahan*. Academia.Edu. https://www.academia.edu/5899984/Penggunaan_Media_Sosial_bagi_Humas_di_Lembaga_Pemerintahan
- Kurniawan, Y. M. (2019). *Administrasi Keuangan Pengertian Dan Ruang Lingkup Keuangan Negara*.
- Moertini, V. S. (2020). Algoritma Pengelompokan k-Menas Paralel untuk Memproses Big Data. In *Program Data Science 24 (Eds). Pengantar Data Science dan Aplikasinya bagi Pemula (1st ed., pp. 207-227)*. Unpar Press Bandung. Bandung.
- Nawang Sari, E. R., Dilla, H. A., Ardhani, D., Jihan, Anaqoh, S., Islami, R. K., & Santoso, I. H. (2021). Kebijakan Vaksinasi sebagai Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. In A. Kriswibowo & D. Darmadi (Eds.), *Transisi Kenormalan Baru: Eksistensi BUM Desa, UMKM, dan Ormas (1st ed., pp. 98–99)*. Penerbit Program Studi Administrasi Publik.
- NSF. (2016). *The National Science Foundation Open Government Directive Plan*. 1, National Science Foundation: NSF. USA.

- Nur, E. (2021). Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 02, 52. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4198>.
- OPM.GOV. (2016). Open Government Plan Version 4.0. 1, United States Office of Personnel Management. Washington DC.
- Piotrowski, S. J. (2016). The “Open Government Reform” Movement: The Case of the Open Government Partnership and U.S. Transparency Policies. *The American Review of Public Administration*, 47(2), 155–171.
- Priyatna, C. C., Prastowo, F. A. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 114. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.26115>.
- Pusdatin Dephub. (2012). Open Government Indonesia (OGI) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. <http://dephub.go.id/post/read/open-government-indonesia-ogi-13385>. Diakses pada tanggal 09 April 2022.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2022). *Status Vaksinasi COVID-19 Nasional (18 April 2022)*. Covid19.Go.Id.
- Seok-Jin, E., Hanchan, H., & Hounq, K. J. (2018). Can social media increase government responsiveness? A case study of Seoul, Korea. *Government Information Quarterly*, 35. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.10.002>.
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan. *Seminar Nasional Pendidikan*, 1–9.
- Solihin, F., Awaliyah, S., & Shofa, A. M. A. (2021). Pemanfaatan Twitter Sebagai Media Penyebaran Informasi Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. *Jurnal Pendidikan Ilmu ...*, 2021(13), 52–58. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/view/2813>.
- Solihin, O. (2021). Implementasi Big Data Pada Sosial Media Sebagai Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah. *Jurnal Common*, 5(1), 56–66.
- Suminto, A., & Al Farizi, A. (2020). Analisis Pemanfaatan Media Sosial Twitter oleh Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. *Sahafa Journal of Islamic Communication*, 2(2), 191. <https://doi.org/10.21111/sjic.v2i2.4394>.
- Surokim, Hamzah, H. M. A., Rakhmawati, Y., Handaka, T., Dartiningsih, B. E., Kurniasari, D., N., Quraisyin, D., TrisilowatyD., Julijanti, D. M., Arifin, S., Rachmad, T. H., & Alief, L. A. (2017). *Internet, Media Sosial, Dan Perubahan Sosial Di Madura* (Surokim (ed.); 1st ed.). <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-4-IKOM-Internet-Media-Sosial-dan-Perubahan-Sosial-di-Madura.pdf>.
- Sylvana, Y., & Selian, M. A. H. (2021). Vaksinasi COVID-19 Yang Diadakan Oleh Pemerintah RI Dalam Upaya Memerangi Penyakit COVID-19. *Jurnal Medika Utama*, 1818–1827.
- Tang, Y., & Hew, K. F. (2017). Using Twitter for education: Beneficial or simply a waste of time? *Computers & Education*, 106, 97–118. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2016.12.004>.

- Vinka, A. M., & Michele, N. (2021). Pengaruh Teknologi Internet Terhadap Pengetahuan Masyarakat Jakarta Seputar Informasi Vaksinasi Covid-19. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(1), 1–13.
- Witanto, J. N., Lim, H., & Atiquzzaman, M. (2018). Smart government framework with geo-crowdsourcing and social media analysis. *Future Generation Computer Systems*, 89, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.future.2018.06.019>.